

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Tingkat kemandirian keuangan pada saat pandemi COVID-19 mengalami perbaikan sebesar 0,003 dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Meskipun secara keseluruhan tingkat kemandirian keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat baik sebelum maupun pada saat pandemi masih tergolong rendah dengan pola hubungan konsultatif.
2. Tingkat derajat desentralisasi fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Desentralisasi fiskal pada saat pandemi COVID-19 lebih tinggi 0,003 dibandingkan dengan sebelum COVID-19. Meskipun secara keseluruhan tingkat desentralisasi fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih tergolong kurang baik dalam penyelenggaraan desentralisasi baik sebelum maupun pada saat pandemi COVID-19.
3. Tingkat efektivitas keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 mengalami perbedaan yang signifikan. Dilihat dari rata-rata tingkat efektivitas keuangan pada saat pandemi COVID-19 mengalami penurunan sebesar 0,093. Pengelolaan PAD sebelum pandemi COVID-19 sudah dinilai sangat efektif, namun pada saat pandemi COVID-19 menurun menjadi kurang efektif.
4. Tingkat efisiensi keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 mengalami perbedaan yang signifikan. Dilihat dari rata-rata tingkat efisiensi pada saat pandemi COVID-19 mengalami perbaikan sebesar 0,05 dibandingkan sebelum pandemi COVID-19.

B. Saran

Adapun saran atas penelitian ini yang dapat diberikan terkait hasil penelitian dan adanya keterbatasan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat
 - a. Sebagian besar daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih memiliki kemampuan yang rendah dalam melaksanakan otonomi dan desentralisasi fiskal. Sehingga harus ada peningkatan kontribusi PAD terutama untuk pemulihan kondisi pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki daerah, pengembangan badan usaha dengan mendayagunakan masyarakat.
 - b. Terdapat kesenjangan kinerja keuangan yang tinggi antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, sehingga diperlukan peranan pemerintah provinsi dalam memberikan arah pengembangan potensi daerah, dan peranan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam meningkatkan sumber daya yang dimiliki daerah masing-masing yang dapat mendukung perbaikan kinerja keuangan daerah.
2. Untuk peneliti selanjutnya
 - a. Memperluas indikator penilaian kinerja keuangan, seperti menambahkan rasio pertumbuhan dan keserasian, juga melihat dari indikator laporan keuangan seperti rasio solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, dan fleksibilitas keuangan.
 - b. Dalam penelitian hanya mengambil data dua periode akuntansi yaitu tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020. Sedangkan fakta di lapangan di tahun 2021 pandemi COVID-19 masih berlangsung. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah periode waktu pengamatan untuk hasil penelitian yang lebih spesifik.